



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas



keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok mengatur sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam peraturan tersebut menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga teknis daerah berbentuk dinas, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government*, informasi dan infrastruktur telematika;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



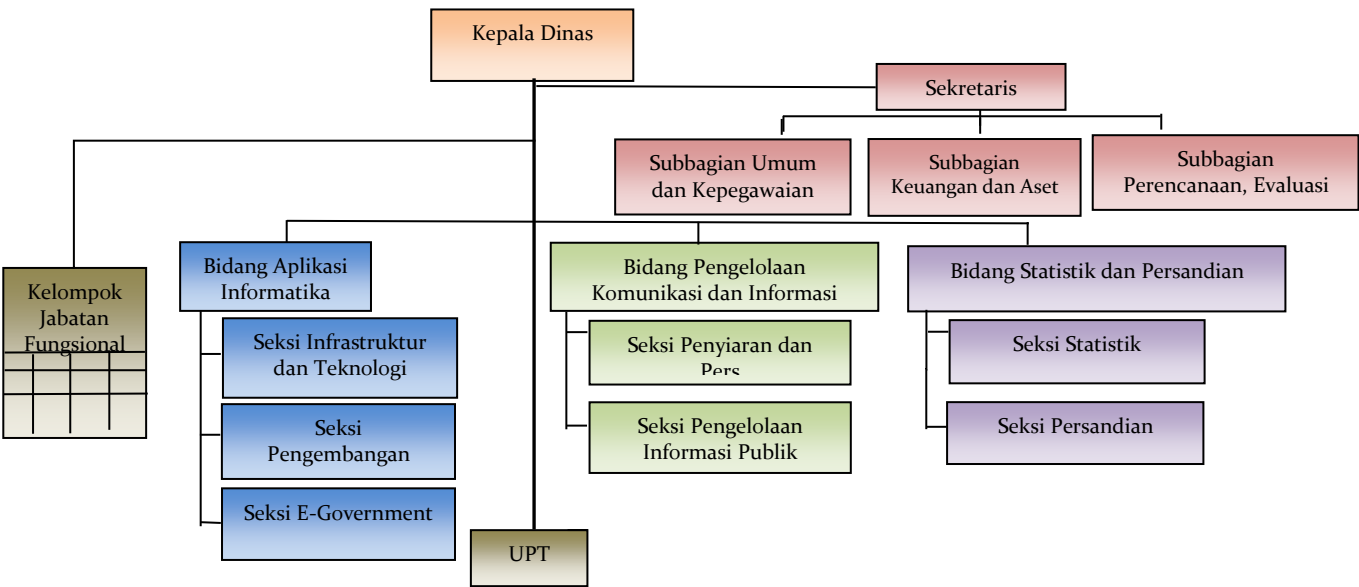
Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

- a. **Sekretaris**, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Kepegawaian
- b. **Bidang Statistik dan Persandian**, membawahi :
 - 1) Seksi Statistik
 - 2) Seksi Persandian
- c. **Bidang Aplikasi Informatika**, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - 2) Pengembangan Aplikasi
 - 3) Seksi E-Government
- d. **Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**, membawahi:
 - 1) Seksi Penyiaran dan Pers
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



1.4 Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 23 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 23 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon II.b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV.a) sebanyak 10 orang, dan pelaksana sebanyak 8 orang. Disamping itu terdapat pegawai honorer/ Non PNS sebanyak 33 orang.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Kepala Seksi/ Kasubag				10			10
5	Pelaksana					8		8
6	Non PNS						33	33
	Total		1	4	10	8	28	56

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris	1					1
3	Kepala Bidang	3					3
4	Kepala Seksi/ Kasubag	1	9				10
5	Pelaksana		3	4			7
6	Non PNS					33	33
	Total	6	12	4		33	56

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1/D3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		2	1		3
4	Kepala Seksi/ Kasubag		2	8		10
5	Pelaksana			2	6	8
6	Non PNS			15	18	33
	Total	1	5	26	24	56

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020



1.5 Pemanfaatan Aset

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat per 31 Desember 2020 adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

NO.	URAIAN	NILAI ASET 2019	NILAI ASET 2020
1.	Tanah	812.019.550.00	812.019.550.00
2.	Peralatan dan Mesin	10.564.420.685.52	11.875.825.209.35
3.	Gedung dan Bangunan	6.241.897.381.03	6.067.570.922.10
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.128.654.530.24	4.580.669.920.16
5.	Aset Tetap Lainnya	72.457.000.00	72.314.700.00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Aset Tetap		21.819.260.646.79	23.408.400.301.61
Aset Tidak Berwujud		2.544.226.491.76	3.371.631.491.76
Aset Lain-lain		-	-
Aset Rusak Berat		-	766.855.845.18
Jumlah Aset Lainnya		2.544.226.491.76	4.138.487.336.94
Jumlah Total Aset		24.363.487.138.55	27.546.887.638.55

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2020

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon.

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengelola anggaran sebesar Rp 14.636.445.300,- (DPPA TA 2020) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 4.090.589.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 3.822.511.904,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- 8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- 9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.8 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :



- 1) Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
- 2) Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
- 3) Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
- 4) Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
- 5) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

1.9 Sistematika Penulisan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada panduan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Latar Belakang, Tupoksi, Struktur Organisasi, Keadaan Pegawai, Pemanfaatan Aset, Keuangan, Landasan Hukum, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang : Rencana Strategis Organisasi yang terdiri dari Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Cara mencapai tujuan dan sasaran. Pada Bab ini juga menjabarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang berisi sasaran, Indikator sasaran dan Program-program 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Solusi.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang ada pada dokumen Renstra 2019-2024 mengacu pada Visi dan Misi Bupati Cirebon Tahun 2019-2024, yaitu :



Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai Visi Bupati Cirebon dan Misi keempat yaitu **“terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa”** dengan sasaran **“meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik”** sehingga pemerintahan Kabupaten Cirebon yang diharapkan kedepan adalah pelayanan publik



yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi.

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun tujuan dan sasaran sesuai dengan implementasi misi keempat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan *smart* serta penguatan otonomi desa.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu ***“Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional”***, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE			
DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola	7	7%
	Kebijakan Layanan	10	10%
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan	2	8%
	Strategi dan Perencanaan	2	8%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	12%
Layanan SPBE	Administrasi pemerintahan	6	33%
	Publik	7	22%

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.2
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	▪ Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan ▪ Proses tata kelola dilakukan secara <i>ad hoc</i>
2. Terkelola	▪ Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan
3. Terstandarisasi	▪ Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi
4. Terintegrasi dan Terukur	▪ Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dg pengukuran kinerja secara kuantitatif
5. Optimum	▪ Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Tabel 2.3 Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Kolaborasi	▪ Layanan SPBE terintegrasi dan layanan SPBE lain
5. Optimalisasi	▪ Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

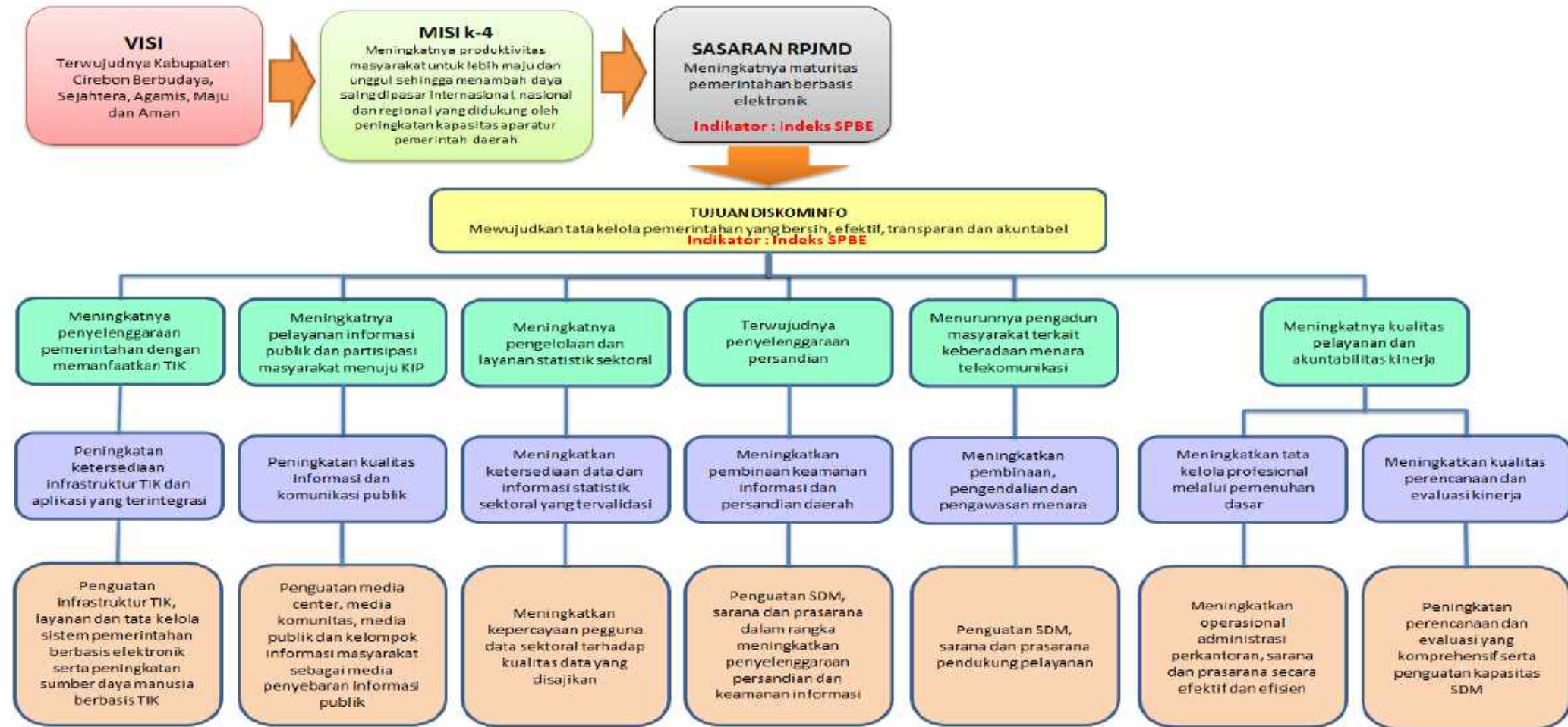
**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel”**

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian;
- 5) Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi;
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta sasaran dan indikator sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut.





2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yaitu :

- Misi Keempat** : Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung olehn peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
- Tujuan** : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi desa
- Sasaran** : Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 6 indikator sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.1.		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	POIN	• Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK • Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Aplikasi Informatika
4.1.2.		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	POIN	• Alasan Pemilihan Indikator: Mewujudkan pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.3.		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	PERSEN	• Alasan Pemilihan Indikator: Urusan Pemerintahan statistik sektoral pada Pemkab Cirebon selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga termanfaatkan • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil pengolahan data • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik dan Persandian
4.1.4		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	LEVEL	• Alasan Pemilihan Indikator: Alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013 • Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik dan Persandian



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.5.		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	PERSEN	Alasan Pemilihan Indikator: Terkait tugas tambahan sebagai tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang diadukan}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100\%$ Jenis Data: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil penghimpunan data pengaduan Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik dan Persandian
4.1.6.		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Formulasi pengukuran: $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Jenis Data: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian Unit Kerja Penanggung Jawab: Sekretariat



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja tahun 2020 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian kinerja dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah atau Eselon II. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 40 (empat puluh) kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 14.636.445.300,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.090.589.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.545.856.300,-.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HARRY SAFARI M, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,


Drs. H. IMRON, M.Ag.


Drs. H. HARRY SAFARI M, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012



LAMPIRAN PERIANJAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$= \frac{\sum \text{Jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika	2,93 POIN	2,93 POIN
4.1.1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$= \frac{\sum \text{Jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika	2,84 POIN	2,57 POIN
4.1.2.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitas})}{\text{Total Komponen}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	56,63 POIN	56,63 POIN
4.1.6.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	$= \frac{\text{Total dari nilai persentase per unit}}{\text{total untuk yang terisi}} \times \text{nilai tertinggi}$	Non Kumulatif	Meningkat	Selektariat	3,55 POIN	3,55 POIN
4.1.3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	$= \frac{\text{Nilai dari yang diinputkan} + \text{Nilai tertinggi dari yang terisi}}{\text{total anggarannya}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	40 PERSEN	40 PERSEN
4.1.4.	Tenwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	$= \frac{\sum \text{Jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	2 LEVEL	2 LEVEL
4.1.5.	Memurninya pengeloaan masyarakat terkait keberadaan media telekomunikasi	Persentase pengeloaan keberadaan media telekomunikasi	$= \frac{\sum \text{murni telekomunikasi yang diinputkan}}{\sum \text{media telekomunikasi}} \times 100\%$	Kumulatif	Menurun	Bidang Statistik dan Persandian	10 PERSEN	10 PERSEN

No	Program	Anggaran		Keterangan	
		Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)		
4.1.1.21.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.338.806.200,00		7.088.512.200,00	Sumber Dana: DAU, PAD
4.1.2.20.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.338.226.700,00		1.558.680.500,00	Sumber Dana: DAU, PAD
4.1.3.18.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	680.561.700,00		608.529.700,00	Sumber Dana: DAU
4.1.4.19.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100.000.000,00		141.231.500,00	Sumber Dana: DAU
4.1.5.22.	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Media Telekomunikasi	150.000.000,00		68.705.000,00	Sumber Dana: DAU

Lampiran Perkin Perubahan: 2.10.01.-Etelon II b
siamak.csirebonkab.go.id



No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.6.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	915.585.900,00		Sumber Dana DLU
4.1.6.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.344.000,00		Sumber Dana DLU
4.1.6.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91.753.700,00		Sumber Dana DLU
4.1.6.07.	Program Pengembangan Sistem Pelencanaan Sektor	36.523.800,00		Sumber Dana DLU
J U M L A H		7.927.808.000,00	10.545.856.300,00	

Phak Kedua
RUPATI CREBON, D

Drs. H. IMRON, M.Ag.

Sumed, October 2020
Phak Kedua
Kecala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. H. HARRY SAFARI M, MM,
Pamona Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012



2.4 Rencana Kerja Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dilakukan program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.4
Program Kegiatan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik	3 jenis
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	22 unit
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1896 m2
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	32 jenis
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang sediakan	12 jenis
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah mamin tamu	1 tahun
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	Tersedianya jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	1 tahun
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeuler yang disediakan	1 jenis
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen
IV	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	2 dokumen
V	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
1	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	200 konten
2	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	4 layanan
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	1 paket
4	Penyebarluasan informasi Publik melalui Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	1 media
5	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi yang dikelola	1 media
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	2 media
7	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kab Cirebon	1 tahun
VI	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
1	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diperpanjangnya layanan domain utama dan sub domain	1 domain



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target
2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi	2 aplikasi
3	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	15 orang
4	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City	1 kegiatan
5	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet	1 layanan
6	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center	1 layanan
7	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah website lembaga, pelayanan public dan pemerintah yang dapat diakses	5 website
8	Operasional Cirebon Command Center	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon <i>Command Center</i>	1 layanan
VIII	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		
1	Pengolahan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik sektoral	1 dokumen
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah dokuemn PDRB Kec yang disusun	1 dokumen
3	Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Presentase keterisian data yang dikelola	60 persen
IX	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
1	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah pelayanan keamanan informasi	1 layanan
X	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi		
1	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	40 kecamatan



2.5 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.636.445.300,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.090.589.000,- dan Belanja Langsung Rp. 10.545.856.300,-.

Tabel 2.5
Target Belanja APBD Tahun 2020

Uraian	Target (Rp.)	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	4.090.589.000	27.95
Belanja Langsung	10.545.856.300	72.05
Jumlah	14.636.445.300	100

Sumber : Diskominfo Kab Cirebon, 2020

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	7.088.512.200	67.22	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	1.558.680.500	14.78	Didukung oleh 1 (satu) program : • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	606.529.700	5.75	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	141.231.500	1.34	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
5	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	66.705.000	0.63	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	1.084.197.400	10.28	Didukung oleh 4 (empat) program : • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Sumber : Diskominfo Kab Cirebon, 2020



2.6 Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

2.7 Instrumen Pendukung

Pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah telah dilakukan secara terpusat dan berkala setiap bulannya mempergunakan aplikasi/sistem informasi berbasis *web* yaitu melalui *simonek.cirebonkab.go.id*



Dashboard Aplikasi SIMONEK

Tahun 2020		Bulan 12		Tahun Anggaran		Bulan Anggaran	
No	Kode	Uraian	Plan	Revisi	Plan	Revisi	%
1	4.1.1	Memperkuat sistem informasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	4,208,800,000.00	7,000,000,000.00	6,940,800,000.00	97.97	
2	4.1.2	Memperkuat pelayanan publik dan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi	1,108,000,000.00	1,000,000,000.00	1,015,000,000.00	97.97	
3	4.1.3	Memperkuat pemantauan dan evaluasi kinerja instansi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan daerah	880,000,000.00	800,000,000.00	890,727,144.00	98.99	
4	4.1.4	Memperkuat pengembangan sumber daya manusia	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	50.00	
5	4.1.5	Memperkuat pemeliharaan infrastruktur informasi dan komunikasi	100,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80.00	
6	4.1.6	Memperkuat kualitas pelayanan dan administrasi keuangan, komunikasi dan informasi kabupaten	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	90.91	

Halaman 1 dari 1

Simonek Cirebon

Gambar 2. Tampilan Dashboard Aplikasi *simonek.cirebonkab.go.id*



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		% Capaian	Kriteria/ Kode
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 poin	2.57 poin	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56.63 poin	31.87 poin	56,28	Rendah



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		% Capaian	Kriteria/ Kode
			Target	Realisasi		
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40 %	58,05 %	145,13	Sangat Baik
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	2 level	2 level	100	Sangat Baik
5	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	10%	0.576%	194,24	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.550 poin	3.558 poin	100,23	Sangat Baik

Sumber : Diskominfo Kab Cirebon, 2020

Dari tabel di atas, terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan untuk masing-masing sasaran strategis terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Pada tahun 2020, ada 5 (lima) indikator telah memenuhi/melampaui target yang ditetapkan ($\geq 100\%$) sehingga masuk kategori **Sangat Baik** dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dengan tingkat capaian 56,28%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :



3.2.1 Sasaran Strategis ke-1

Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Domain tata Kelola SPBE, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 poin	2.57 poin	100	Sangat baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

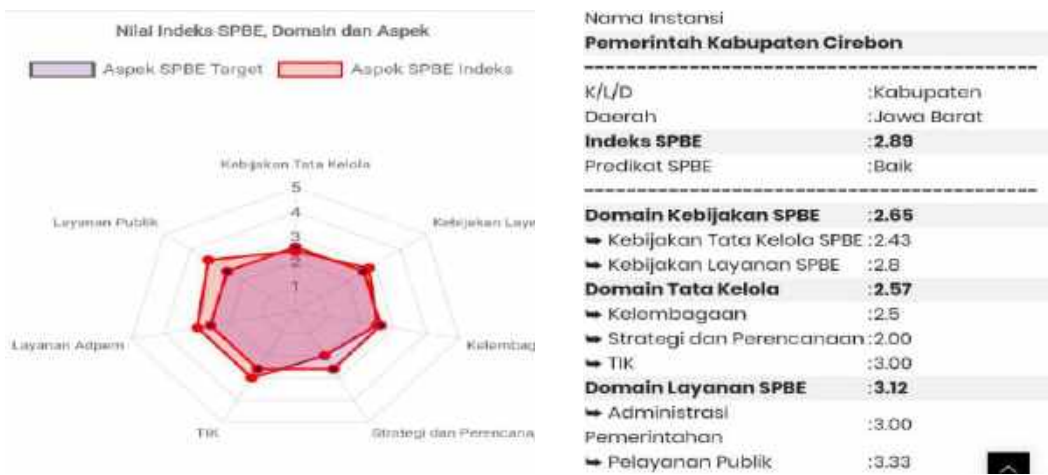
Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 “*meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah 2.57 poin. Imbas dari Pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Kemenpan RB tidak melakukan *assessment* terkait SPBE di Kabupaten Cirebon sehingga tingkat kematangan dari pelaksanaan indikator ini masih menggunakan penilaian tahun 2019 sebesar 2.57 poin. Dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 poin	2.57 poin	100	Sangat baik

Ketercapaian indikator tersebut diukur melalui tingkat kematangan aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan serta aspek TIK yang diukur

melalui penilaian Indeks SPBE yang mengacu pada amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Untuk hasil penilaian indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dari gambar diatas, dapat dilihat hasil penilaian Domain Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar 2.57 poin, yang terdiri dari:

- Aspek Kelembagaan dengan capaian 2.5 poin
- Aspek Strategi dan Perencanaan dengan capaian 2.00 poin
- Aspek TIK dengan capaian 3.00 poin

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,5 <= 5,0	Memuaskan
2	3,5 <= 4,5	Sangat Baik
3	2,6 <= 3,5	Baik
4	1,8 <= 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil pencapaian indeks domain tersebut merupakan salah satu kontribusi dalam pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, serta masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Cirebon. Nilai Indeks SPBE hasil penilaian oleh Kemenpan RB yaitu 2,89 poin dan masuk dalam kategori **Baik**. Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2019-2024 sebesar 2,78 poin (tahun 2020) sehingga untuk capaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan salah satu sasaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon telah melampaui target.



Pencapaian Indikator Tujuan Diskominfo / Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon

No	Indikator Tujuan Diskominfo/ Indikator Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks SPBE	2.78	2.89	103,96

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2020 (2.57 poin) terhadap tahun 2019 (2.57 poin) maka tidak terjadi perubahan capaian kinerja. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 Kemenpan RB tidak melakukan *assessment* terkait SPBE di Kabupaten Cirebon akibat dari Pandemi *Covid-19* sehingga tingkat kematangan dari pelaksanaan indikator ini masih menggunakan penilaian tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 poin	2.57 poin	2.57 poin	100

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 poin	2,57 poin	100	3,55 poin	72,39

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks Domain Tata Kelola SPBE



sebesar 3,55 poin. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar 2.57 poin. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 72,39% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis kesenjangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yang akan dicapai dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan layanan SPBE. Identifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi *feedback* untuk rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan infrastruktur yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada aspek infrastruktur adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Kondisi Saat ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	<i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>	Komponen DRC pada saat ini belum dibangun	Perlu ada DRC sebagai backup untuk Data Center yang ada saat ini	Pembangunan DRC sebagai backup aplikasi maupun tempat penyimpanan data Pemkab Cirebon. Pembangunan DRC dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari DRC untuk aplikasiaplikasi dan data-data utama.
2	<i>Government Service Bus (GSB)</i>	Implementasi GSB pada saat ini belum optimal. Ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya data-data yang ada di lingkungan Pemkab Cirebon	Data-data utama sudah terintegrasi baik antar SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon maupun lintas instansi Provinsi dan pusat	Penguatan GSB di lingkungan Pemkab Cirebon melalui tahapantahapan sebagai berikut: • Sosialisasi GSB di lingkungan Pemkab Cirebon • Kajian integrasi • Pembuatan aturan terkait integrasi • Implementasi integrasi
3	<i>Server Bussiness Intelligece</i>	Komponen <i>server bussiness intelligence</i> belum dibangun	Diperlukan adanya server bussiness intelligence untuk menyediakan laporanlaporan yang aktual dan faktual yang dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk merumuskan pembangunan daerah	Pembangunan bussiness intelligence secara bertahap melalui tahapan: • Perumusan konsep <i>bussiness intelligence</i> Pemkab Cirebon • Pembangunan aplikasi <i>bussiness intelligence</i> • Pembangunan server <i>bussiness intelligence</i>



Selain faktor kesenjangan, terdapat pula faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran 1, yaitu :

- 1) Telah terkoneksinya jaringan internet di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon sampai ke tingkat kelurahan;
- 2) Telah dibangunnya beberapa aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi layanan publik;
- 3) Telah membangun dan mengelola Data Center yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai server yang digunakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan layanan SPBE kepada *stakeholder*;
- 4) Telah disusunnya dokumen arsitektur SPBE yang bertujuan untuk menyiapkan dan menyediakan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kabupaten Cirebon.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-1

Dalam mencapai sasaran strategis ke-1 ini didukung oleh 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan, dengan total anggaran Rp. 7.088.512.200,- atau 67,22% dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.942.863.771,- dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 145.648.429,-.

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 1

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
1	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.080.000	98.16	100	920.000	1.84
2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	197.000.000	193.695.000	98.32	100	3.305.000	1.68
3	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	48.271.400	48.150.575	99.75	100	120.825	0.25
4	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	154.000.000	152.941.488	99.31	100	1.058.512	0.69



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi Fisik		Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
5	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.883.596.000	2.880.772.996	99.90	100	2.823.004	0.1
6	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	3.207.200.000	3.074.034.000	95.85	100	133.166.000	4.15
7	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	450.000.000	446.716.759	99.27	100	3.283.241	0.73
8	Operasional Cirebon Command Center	98.444.800	97.472.953	99.01	100	971.847	0.99
Jumlah		7.088.512.200	6.942.863.771	97.95	100	145.648.429	2.05

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-1 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 7.088.512.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.942.863.771,- sisa sebesar Rp.145.648.429,- atau tercapai sebesar 97,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Layanan nama Domain dan Sub Domain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan *output* kegiatan adalah diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan subdomain yaitu *cirebonkab.go.id*
- b. Kegiatan Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi, dengan *output* kegiatan adalah jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang dibangun yaitu dibangunnya 2 aplikasi.
- c. Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan *otuput* kegiatan adalah jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek yaitu pelatihan design grafis sebanyak 15 orang.
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama *Smart City*, dengan *output* kegiatan adalah penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon *Smart City*.
- e. Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra pemerintah Daerah, dengan *output* Kegiatan adalah Belanja bandwidth, belanja Cpanel, SSL, IP Publik, pergantian suku cadang WAN, FO, Videotron, serta pemeliharaan FO.

- f. Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar data center, Disaster Recovery center dan TIK, dengan *output* Kegiatan adalah penggantian suku cadang NOC, pemeliharaan NOC, pengadaan server data center, *backbone* internet, *hotspot* area publik (*outdoor* dan *indoor*), *licenci firewall*, Kabel *core* Data Center.
- g. Kegiatan Website Lembaga, pelayanan Publik dan kegiatan pemerintah Daerah, dengan *output* Kegiatan adalah jasa pengembangan website dan webmail di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta Pengembangan pelayanan publik SIM Welas Asih *Mobile*.
- h. Kegiatan Operasional Cirebon *Command Center*, dengan *output* Kegiatan adalah cakupan operasional Kabupaten Cirebon *Command Center*.

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini dengan ditunjang infrastruktur yang cukup memadai.



Kegiatan teleconference di Cirebon Command Center



Topologi jaringan internet lingkup Pemkab Cirebon



Data Center

Ruang Server di Gedung Data Center



Learning Center

Ruang Bimtek di Gedung Data Center



3.2.2 Sasaran Strategis ke-2

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik

Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56,63%	31,87%	56,28	Rendah

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah 56,63%. Berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penilaian Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Badan Publik di Jawa Barat tahun 2020 menetapkan bahwa Kabupaten Cirebon memperoleh nilai akhir yaitu 31,87% atau tercapai 56,28% dari target yang ditetapkan sehingga masuk dalam kriteria **Rendah**.

Tabel 3.9
Hasil Akhir Nilai KIP Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		15%	5%	5%	20%	25%	30%	
1	Kabupaten Cirebon	43,16%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	48,00%	31,87%

Sumber : BA Hasil Monev KI Prov Jabar, 2020



Berdasarkan kategori peringkat nilai indeks keterbukaan informasi publik seperti pada tabel di bawah, Kabupaten Cirebon masuk pada peringkat **tidak informatif**. Dengan nilai target KIP 56,63%, posisi indeks KIP tahun 2020 dengan nilai 31,87% menunjukkan bahwa hampir semua komponen penunjang KIP masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 3.10
Kualifikasi Peringkat

No	Peringkat	Nilai
1	Informatif	97-100
2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Sumber : Perki No 5 tahun 2016

Nilai akhir penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Cirebon yaitu 31,87% dengan peringkat **tidak informatif**. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa untuk Kabupaten Cirebon, komponen penunjang keterbukaan informasi publik masih belum optimal diantaranya:

- 1) *Berkala dengan nilai 43,16%*
Ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri dari 9 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 2) *LLIP dengan nilai 20,00%*
Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan laporan pelayanan informasi publik terdiri dari 15 bagian jenis informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 3) *PPID dengan nilai 20,00%*
Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan kewajiban pembentukan dan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terdiri dari 2 bagian jenis kewajiban pembentukan dan dukungan terhadap PPID sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4) *SLIP dengan nilai 20,00%*
Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib disediakan setiap saat terdiri dari 6 bagian kewajiban



dalam pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

- 5) *Setiap Saat dengan nilai 20,00%*
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib disediakan setiap saat terdiri dari 15 bagian jenis informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6) *Serta Merta dengan nilai 48,00%*
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala terdiri dari 9 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56,63%	31,87%	56,28	Rendah

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 (31,87%) terhadap tahun 2019 (55,52 poin) maka terjadi penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan yaitu 23,65%. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.



Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,52	56,63	31,87	56,28

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cirebon tahun 2020 terhadap tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Nilai Tiap Indikator KIP

Tahun	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
2019	61,11	28,00	79,17	51,85	59,26	33,33	55,52
2020	43,16	20,00	20,00	20,00	20,00	48,00	31,87

Berdasarkan tabel tersebut bahwa 6 (enam) indikator penilaian keterbukaan informasi publik mengalami penurunan nilai. Menurunnya nilai indeks KIP tersebut disebabkan:

- 1) Belum optimalnya kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;
- 2) Belum optimalnya kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;
- 3) Belum optimalnya kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- 4) Belum optimalnya kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik;
- 5) Belum optimalnya kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56,63%	31,87%	56,28	64,05 %	49,76

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 64,05%. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar 31,87%. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 49,76% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

- (1) Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyerahkan Daftar Informasi Publik;
- (2) Tata kelola dan tindak lanjut aduan masyarakat dari masing-masing Perangkat Daerah masih rendah;
- (3) Peran PPID pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- (4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi menghambat pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Terkendalanya Updating informasi tentang pembangunan Kabupaten Cirebon kepada masyarakat.

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) Perlu adanya kesadaran, pemahaman dan komitmen yang kuat mengenai pelayanan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Meningkatkan peran dan fungsi PPID pada tiap Perangkat Daerah melalui pengembangan sistem informasi dan *portal/website* PPID pada seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID Perangkat Daerah mengenai tugas pokok, fungsi PPID dan mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan perlu didukung Tenaga Ahli Profesional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (4) Meningkatkan sistem manajemen informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-2

Dalam mencapai sasaran strategis ke-2 ini didukung oleh 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan total anggaran Rp 1.558.680.500 Atau 14,78% dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.515.644.485,- dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 43.036.015,-.

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 2

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.558.680.500	1.515.644.485	97.24		43.036.015	2,76
1	Produksi Konten Informasi Publik	172.893.000	170.232.160	98.46	100	2.660.840	1,54
2	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	404.249.200	404.007.530	99.94	100	241.670	0,06
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	230.000.000	228.100.000	99.17	100	1.900.000	0,83
4	Penyebarluasan informasi Publik melalui Media	280.856.400	276.499.400	98.45	100	4.357.000	1,55
5	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	100.734.000	97.134.000	96.43	100	3.600.000	3,57
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	151.447.900	124.206.230	82.01	100	27.241.670	17,99
7	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	218.500.000	215.465.165	98.61	100	3.034.835	1,39
	Jumlah	1.558.680.500	1.515.644.485	97.24		43.036.015	2,76

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-2 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.1.558.680.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.515.644.485,- sisa sebesar Rp.43.036.015,- atau tercapai sebesar 97,24%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik, dengan **Output** kegiatan Produksi Konten Informasi Publik adalah jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan sebanyak 200 konten.
- b) Kegiatan Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan **Output** kegiatan Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat (wawar keliling, pembinaan PPID, publikasi hari besar, jasa iklan, advertorial surat kabar).
- c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan **Output** kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik adalah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi (*workshop* kejournalistikan).
- d) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media, dengan **Output** kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media adalah jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi (media radio dan media TV)
- e) Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah media komunikasi yang dikelola (Majalah Paseban)
- f) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan Komunitas, dengan **Output** Kegiatan adalah jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional secara virtual.
- g) Kegiatan Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian sengketa Informasi Publik, dengan **Output** Kegiatan adalah terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon.

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.



Kegiatan Workshop Jurnalistik Uji Kompetensi Wartawan



Kegiatan Diseminasi Informasi Pembangunan melalui Acara Talkshow Radio



Kegiatan Diseminasi Informasi melalui TV Lokal



Kegiatan Diseminasi Informasi melalui Mobil Wawar Keliling



Pusat Pelayanan Informasi sebagai tempat layanan informasi kepada masyarakat



Salah satu diseminasi informasi melalui Majalah Paseban

3.2.3 Sasaran Strategis ke-3

Sasaran 3

Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Tolok ukur capaian sasaran “meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase , dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40 %	58,05 %	145,13	Sangat baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 “*meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah*” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah 40% dengan realisasi 58,05% atau 145,13% sehingga masuk kriteria **Sangat baik**. Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:

- 1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 20% dari target akhir Renstra
- 2) Persentase keterisian data yang dikelola , dengan target 60% pada tahun 2020.

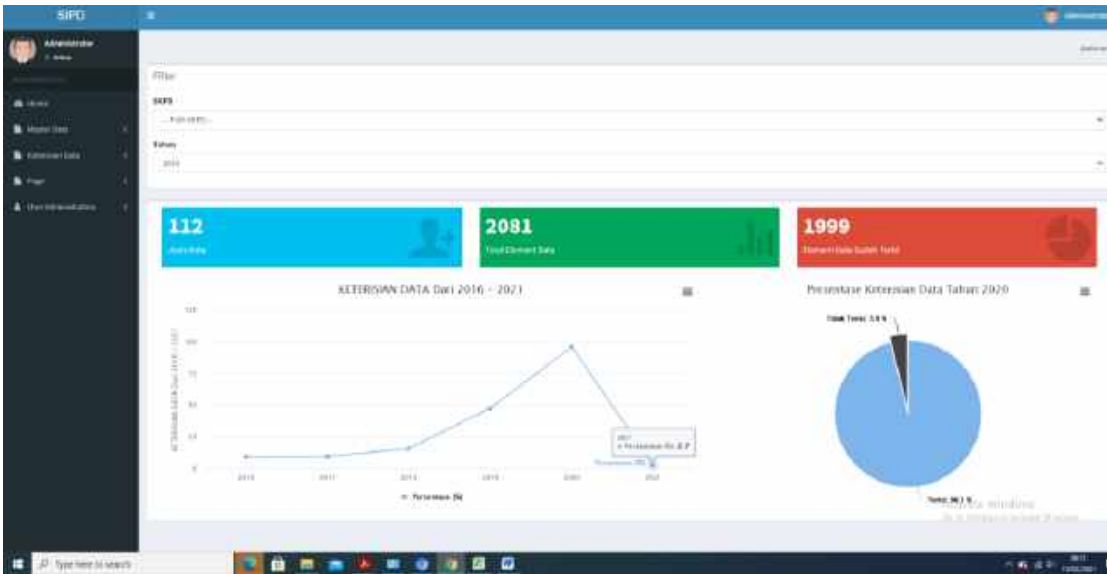
Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

Pada komponen “*persentase dokumen statistik yang dihasilkan*”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Statistik dan Persandian telah menyusun dokumen PDRB Kec, Profil Perangkat Daerah dan dokumen statistik daerah sehingga dapat dikatakan bahwa target **20%** telah didapat.

Sementara maksud dari komponen “*presentase keterisian data yang dikelola*” adalah keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Sampai dengan Bulan Desember 2020, keterisian data SIPD melebihi ekspektasi yang berawal target hanya 60% justru keterisian Data SIPD mencapai **96,1%**, yang terdiri dari :

- Jenis data sejumlah 112 jenis data
- Total elemen data adalah 2081 data; dan
- Elemen data yang sudah terisi adalah 1999 data.



Gambar 4. Dashboard SIPD

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\ &= \frac{(20\% + 96,1\%)}{2} \times 100\% \\ &= \frac{(116,1\%)}{2} \times 100\% \\ &= 58,05 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40 %	58,05 %	145,13	Sangat baik

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian *Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral* tahun 2020 (58,05%) terhadap tahun 2019 (33,80%) maka terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 24,25%.

Pada tahun 2019, dari capaian kinerja *persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral* adalah 33,80%, dari hasil pengukuran capaian persentase



dokumen statistik yang dihasilkan adalah 20% dan capaian persentase keterisian data SIPD adalah 47,6%.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	33,80%	40%	58,05%	145,13

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40%	58,05%	145,13	90 %	64,50

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah*” diukur melalui 1 indikator yaitu persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral sebesar 90%. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar 58,05%. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 64,50% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga melampaui dari target yang ditetapkan.
- 2) Terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik yang merupakan salah satu komponen dalam pengukuran capaian kinerja.

Disamping faktor keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran ini, namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pencapaian ini antara lain :

- 1) Manajemen data
 - Data belum terkelola pada suatu sistem *database*;
 - Data belum tersimpan dalam bentuk file yang seragam dan mudah diakses;
 - Data masih terpisah-pisah pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - Data belum terintegrasi.
- 2) Infrastruktur data
 - Belum semua Perangkat Daerah memiliki sistem atau aplikasi pengelolaan data.
- 3) Sumber daya manusia
 - Belum optimalnya kemampuan SDM pengelola data;
 - Belum tersedianya SDM khusus pengelola data di setiap Perangkat Daerah, kecamatan dan desa.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan data;
- 2) Menyusun standar harga;
- 3) Menyusun metadata;
- 4) Memberikan pelatihan pengumpulan dan pengelolaan data; dan
- 5) Memberikan honorarium untuk petugas pengumpul data.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.



F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-3

Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, dengan total anggaran Rp 606.529.700,- atau 5,75% dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.599.727.744,- dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp 6.801.956,-

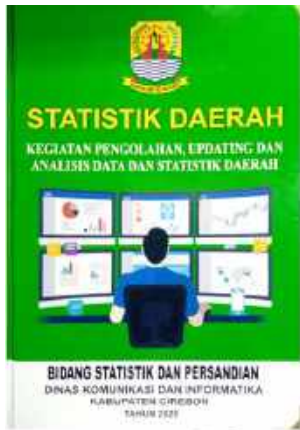
Tabel 3. 21
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 3

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	606.529.700	599.727.744	98,88		6.801.956	1,12
1	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	81.970.000	81.940.000	99,96	100	30.000	0,04
2	Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB	325.500.000	319.910.000	98,28	100	5.590.000	1,72
3	Pengolahan Data sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	199.059.700	197.877.744	99,41	100	1.181.956	0,59
	Jumlah	606.529.700	599.727.744	98,88		6.801.956	1,12

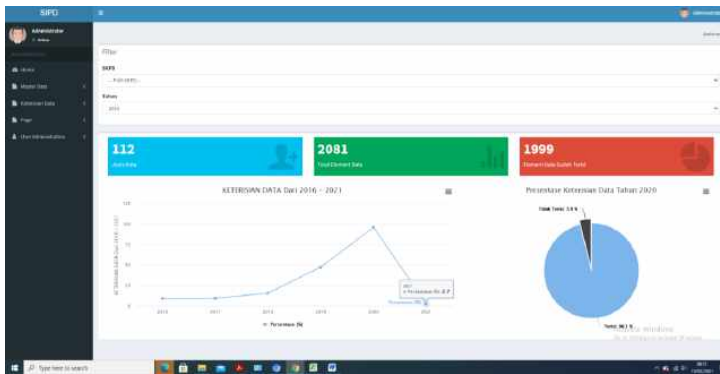
Program dan kegiatan pendukung capaian sasaran strategis 3 yaitu :.

- (1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 606.529.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 599,727.744,- sisa sebesar Rp. 6.801.956,- atau tercapai sebesar 98,88%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, dengan **Output** kegiatan adalah terselenggaranya pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah dan buku profil perangkat daerah.
 - b) Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data PDRB, dengan **Output** kegiatan adalah terwujudnya penyusunan dokumen PDRB kecamatan.
 - c) Kegiatan Pengolahan Data sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dengan **Output** kegiatan) adalah tersajinya data pembangunan/ profil daerah untuk memudahkan melakukan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon.

Berikut *ouput* dari kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

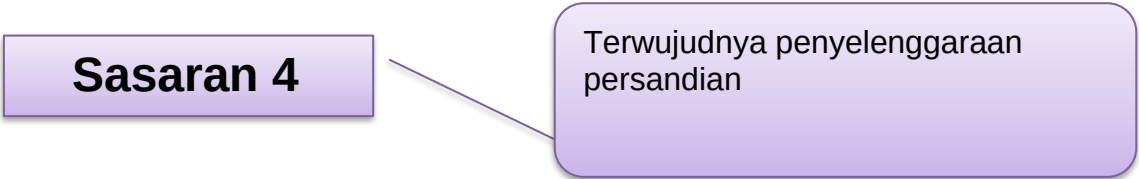


Beberapa dokumen statistik yang telah disusun pada tahun 2020



Tampilan dashboard pada aplikasi SIPD dengan hasil akhir berupa Buku Laporan SIPD

3.2.4 Sasaran Strategis ke-4



Tolok ukur capaian sasaran “*Terwujudnya penyelenggaraan persandian*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

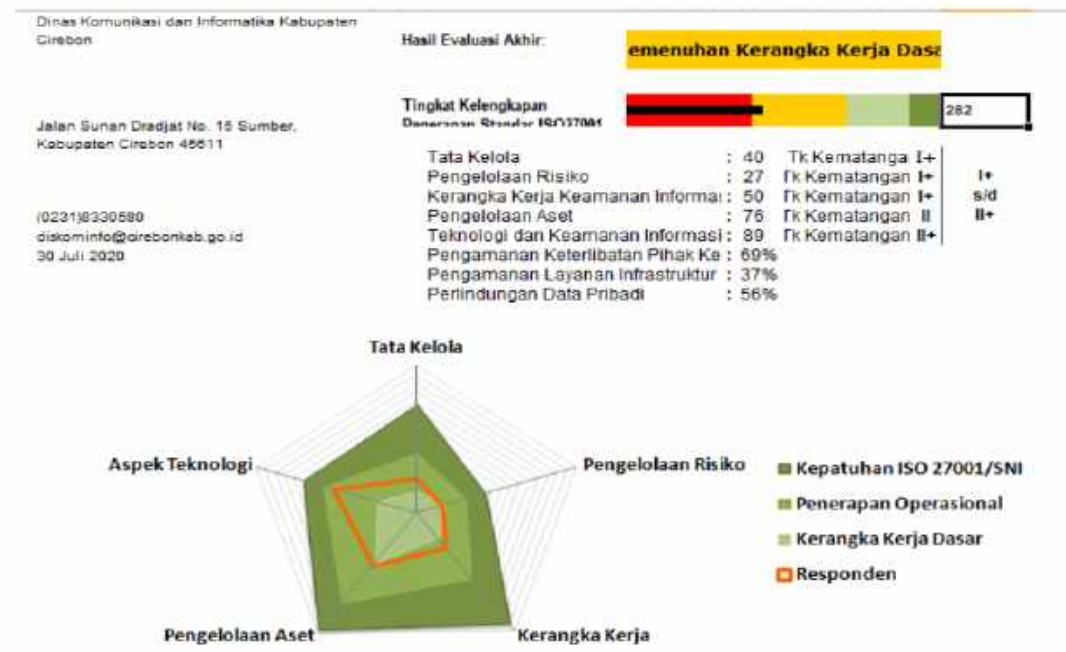
Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level II	Level II	100	Sangat baik



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 “terwujudnya penyelenggaraan persandian” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah Level II. Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak melakukan penilaian Indeks KAMI sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 282 poin dan masuk pada kategori Level II atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kriteria **Sangat Baik**. Berikut hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



Gambar 5. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan KAMI

Dari gambar diatas, dapat dilihat hasil penilaian Indeks KAMI terdiri dari masing-masing area berikut:

- 1) Kategori Sistem Elektronik, dengan skor penetapan 23 poin
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi, dengan total nilai 40 poin
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, dengan total nilai 27 poin
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi, dengan total nilai 50 poin
- 5) Pengelolaan Aset Informasi, dengan total nilai 76 poin
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi, dengan total nilai 89 poin
- 7) Suplemen dengan indikator,
 - a) Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga penyedia Layanan, dengan nilai 69%
 - b) Pengamanan Layanan Infrastruktur, dengan nilai 37%
 - c) Perlindungan Data Pribadi, dengan nilai 56%



KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan kelengkapan control yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013., dengan nilai Indeks KAMI yaitu 282 poin, maka :

- Status Kesiapan dalam kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
- Status Kesiapan dalam kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
- Status Kesiapan dalam kategori Tidak Layak

Sementara, benrdasarkan tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerja COBIT atau CMMI, dengan nilai Indeks KAMI yaitu 282 poin, maka :

- Berada di Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar



Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level II	Level II	100	Sangat baik

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian Indeks KAMI tahun 2020 (Level II) terhadap tahun 2019 (level II) maka terjadi kesamaan capaian kinerja. Pada tahun 2019, Indeks KAMI berdasarkan penilaian adalah 282 poin atau berada pada level II.



Sementara capaian kinerja pada indikator ini menggunakan capaian realisasi tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	Level II	100

B. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	Level IV	50

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*terwujudnya penyelenggaraan persandian*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks KAMI adalah Level IV. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar Level II. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 50% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya dukungan dari konsultan dalam penyelenggaraan persandian.



Meskipun memenuhi target yang diharapkan, namun terdapat hambatan dalam mencapai sasaran strategis ini, diantaranya :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi;
- 2) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan perlu didukung Tenaga Ahli Profesional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 2) Sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar TI;
- 3) Merencanakan kegiatan yang signifikan menunjang peningkatan kematangan keamanan informasi.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-4

Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 ini didukung oleh 1 (satu) program dan satu (satu) kegiatan, dengan total anggaran Rp 141.231.500 Atau 1,34% dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.132.519.584,- dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 8.711.916,-

Tabel 3.26
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 4

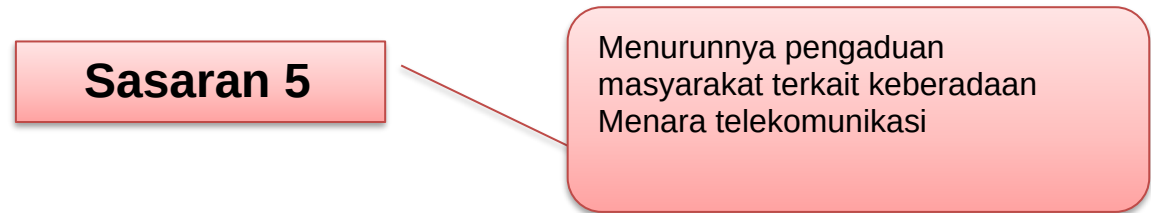
No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	141.231.500	132.519.584	93,83	100	8.711.916	6,17
1	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	141.231.500	132.519.584	93,83	100	8.711.916	6,17
	Jumlah	141.231.500	132.519.584	93,83	100	8.711.916	6,17



Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-4 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebesar Rp.141.231.500,- dan terealisasi sebesar Rp.132.519.584,- sisa sebesar Rp.8.711.916,- atau tercapai sebesar 93,83%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi, dengan **Output** kegiatan adalah Sosialisasi monitoring dan evaluasi penerapan perjanjian kerjasama dengan BSSN dan Pemeliharaan Jaringan Santel.

3.2.5 Sasaran Strategis ke-5



Tolok ukur capaian sasaran “*Menurunnya Pengaduan Masyarakat Terkait Keberadaan Menara Telekomunikasi*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase pengaduan terkait keberadaan menara telekomunikasi, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan Menara telekomunikasi	Persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	10%	0,576%	194,24	Sangat baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5 “*Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan Menara telekomunikasi*” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah 10% atau 52 aduan dari total menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon sebanyak 521 menara. Pada tahun 2020, hanya 3 (tiga) aduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi, sehingga realisasinya adalah 0,576% dengan tingkat



ketercapaian 194,24% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian masuk kriteria **Sangat Baik**. Pengukuran terkait capaian kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang diadukan}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100 \\ &= \frac{3 \text{ aduan}}{521 \text{ menara telekomunikasi}} \times 100\% \\ &= 0,00576 \times 100 \% \\ &= 0,576 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	10% (52 aduan)	0,576% (3 aduan)	194,24	Sangat baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, bahwa menara telekomunikasi adalah bangunan dan/atau dalam bentuk apapun yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung seperti:

- a. Pertanahan;
- b. Penangkal petir
- c. Catu daya
- d. Lampu halangan penerbangan
- e. Marka halangan penerbangan
- f. Pagar halaman

Dan menara telekomunikasi juga harus memiliki identitas hukum yang jelas seperti:

- a. Nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
- b. Lokasi dan koordinat menara bersama telekomunikasi;
- c. Tinggi menara bersama telekomunikasi
- d. Tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi
- e. Kontraktor menara bersama telkomunikasi; dan
- f. Beban maksimum menara bersama telekomunikasi.



B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian prosentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi tahun 2020 (3 aduan) terhadap tahun 2019 (4 aduan) maka terjadi kenaikan capaian kinerja karena terjadi penurunan aduan.

Pada tahun 2019, jumlah aduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi sebanyak 4 aduan. Sementara pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk terkait keberadaan menara telekomunikasi sebanyak 3 aduan dari total 521 menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Prosentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	4 aduan	10% (52 aduan)	0,576% (3 aduan)	194,24

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020		Target Akhir Tahun Renstra	
		Realisasi	% Capaian	Tahun Renstra	% Capaian
Persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	10 %	0,576%	194,24	6%	190,40

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*Menurunnya Pengaduan Masyarakat Terkait Keberadaan Menara Telekomunikasi*” diukur melalui 1 indikator yaitu persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi sebesar 6%. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar

0.576 Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 190,40% sehingga **melampaui memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
- 2) Koordinasi yang intens dengan Satpol PP dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat yang berdekatan dengan zona pembangunan menara telekomunikasi dengan diberikan edukasi terkait keamanan dan dampak menara telekomunikasi .

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi secara berkala;
- 2) Sosialisasi kepada *provider* untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait pembangunan menara telekomunikasi;
- 3) Berkerja sama dengan Satpol PP untuk menjaga kondusivitas masyarakat di dekat zona menara telekomunikasi;
- 4) Berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait masalah perizinan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-5

Dalam mencapai sasaran strategis ke-5 ini didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, dengan total anggaran Rp 66.705.000 atau 0.63 % dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.65.486.084,- dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 1.218.916,-



Tabel 3. 31
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 5

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	66.705.000,-	65.486.084,	98,17		1.218.916	1,83
1	Pengendalian dan Pengawasan menara Telekomunikasi	66.705.000,-	65.486.084,	98,17	100	1.218.916	1,83
	Jumlah	66.705.000,-	65.486.084,	98,17		1.218.916	1,83

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-5 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Program Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan Menara Telekomunikasi
- Alokasi anggaran untuk Program Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 66.705.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.486.084,- sisa sebesar Rp. 1.218.916,- atau tercapai sebesar 98,17%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, dengan **Output** kegiatan adalah monev menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon.

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.



Tim pada saat melakukan monitoring menara telekomunikasi di salah satu Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon



3.2.6 Sasaran Strategis ke-6

Sasaran 6

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.550	3.558	100,23	Sangat baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 6 “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*” dengan target yang ditetapkan tahun 2020 pada indikator sasaran ini adalah 3.550 poin dengan realisasi 3.558 poin atau tercapai 100,23%. Dengan demikian masuk pada kriteria **sangat baik**.

Tabel 3.32

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 6

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.550 poin	3.558 poin	100,23	Sangat baik

Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Cirebon melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dimulai dari tanggal 02 September 2020 s.d. 07 Oktober 2020. Adapun pelayanan yang dinilai adalah



pelayanan jaringan internet di 40 Kecamatan lingkup Kabupaten Cirebon. Jumlah responden adalah 274 aparatur. Hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Perssyaratan pelayanan	3.708
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.653
U3	Waktu penyelesaian	3.704
U4	Biaya/tariff	3.620
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.555
U6	Kompetensi pelaksana	3.588
U7	Perilaku pelaksana	3.558
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.296
U9	Sarana dan prasarana	3.661

Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa:

- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam pelayanan dengan nilai rata-rata 3.296 (menyatakan kurang responsif);
- Persyaratan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,708
- Unsur pelayanan lainnya mempunyai nilai unsur pelayanan diatas nilai unsur pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan menyatakan hasil yang cukup baik, yaitu menyatakan hasilnya baik, meliputi kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kewajaran tarif/baya, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan sudah baik.

a. Nilai Indeks Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &(3.078 \times 0,11) + (3,653 \times 0,11) + (3.704 \times 0,11) + (3.620 \times 0,11) + (3,555 \times 0,11) + \\
 &(3.588 \times 0,11) + (3,558 \times 011) + (3.296 \times 0,11) + (3.661 \times 0,11) = 3,558.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai indeks pelayanan diperoleh 3,558

b. Nilai Survei Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,558 x 25 = **88.94**
- Mutu Pelayanan termasuk kategori **A**.
- Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Baik**.



Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.34
Nilai Survei Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 (3.558 poin) terhadap tahun 2019 (3.068 poin) maka terjadi kenaikan capaian kinerja.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.35
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.068	3.550	3.558	100,23

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2020 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.550 poin	3.558 poin	100,23	4.00 poin	88,95

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada target akhir Renstra Capaian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 4.00 poin. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2020 yang merupakan awal tahun Renstra sebesar 3.558 poin. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 88,95% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam objek pelayanan;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan untuk bekerja tanggap dan akurat dengan mengedepankan pelayanan prima.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan atribut pendukung petugas pelayanan;
- 2) Diperlukan upaya kemudahan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik;
- 3) Memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberikan motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-6

Dalam mencapai sasaran strategis ke-6 ini didukung oleh 1 (satu) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dengan total anggaran Rp 808.628.900,- atau 7,67% dari anggaran total Belanja Langsung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 801.272.649,- atau 99,09% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 7.356.251,-.



Tabel 3.37
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 6

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (%)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (Rp) (%)	
I	Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	808.628.900	801.272.649	99.09		7.356.251	0,91
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.700.000	291.132.341	99.46	100	1.567.659	0,54
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11.865.000	6.876.900	57.96	100	4.988.100	42,04
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	180.000.000	100	100	00	0
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.900.000	4.900.000	100	100	00	0
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.970.000	39.970.000	100	100	00	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.982.400	7.982.400	100	100	00	0
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.000.000	3.000.000	100	100	00	0
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.414.000	12.414.000	100	100	00	0
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.600.000	2.900.000	80.56	100	700.000	19,44
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.816.000	24.816.000	100	100	00	0
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	920.000	920.000	100	100	00	0
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	46.461.500	46.461.008	99.99	100	492	0,01
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	180.000.000	179.900.000	99.94	100	100.000	0,06
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.040.000	147.677.517	99.76			0,24



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (%)
1	Pengadaan Mebeleur	7.000.000	7.000.000	100	100	00	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	62.140.000	61.777.517	99.42	100	362.483	0,58
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	78.900.000	78.900.000	100	100	00	0
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.674.700	82.264.950	97.15		2.409.750	2,85
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.802.800	42.802.050	99.99	100	750	0,01
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	31.181.900	31.172.900	99.97	100	9.000	0,03
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.690.000	8.290.000	77.55	100	2.400.000	22,45
IV	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	42.853.800	42.853.550	99.99		250	0,01
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	42.853.800	42.853.550	99,99	100	250	0,01
	Jumlah	1.084.197.400	1.074.068.616	99.07		10.128.784	0,93

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-6 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.808.628.900,- dan terealisasi sebesar Rp.801.272.649,- sisa sebesar Rp.7.356.251,- atau tercapai sebesar 99,09%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan *output* kegiatan adalah pembayaran jasa air, listrik, dan telepon Diskominfo selama 12 bulan



- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan *output* kegiatan adalah jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 21 unit.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan *output* kegiatan adalah jumlah luasan kantor yang dibersihkan seluas 1.896 m² (3 gedung)
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan *output* kegiatan adalah jumlah peralatan kerja yang dipelihara (komputer, printer dan AC) selama 1 tahun.
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan **output** kegiatan adalah jumlah ATK dan meterai yang tersedia selama 1 tahun
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan **output** kegiatan adalah jumlah barang cetak, penggandaan dan penjiilidan yang tersedia selama 1 tahun
- g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, dengan **output** kegiatan adalah jumlah pengadaan lampu.
- h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan **output** kegiatan adalah jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (printer, *hand sanitizer* dan wastafel).
- i. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan **output** kegiatan adalah jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga (BBM genset dan isi ulang tabung gas)
- j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan **Output** kegiatan adalah tersedianya surat kabar.
- k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah jamuan tamu yang tersedia.
- l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan **Output** kegiatan adalah keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor, dengan **Output** kegiatan adalah tersedianya jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah pengadaan mebeuler sebanyak 1 jenis.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 gedung.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 21 unit.



- (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan **Output** kegiatan adalah terwujudnya penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan akhir tahun.
- (4) Program Pengembangan sistem Perencanaan Sektor
- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor, dengan **Output** kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dinas (renja dan review renstra)

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.12.154.157.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.226.349.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.927.808.000,-.

Setelah adanya perubahan anggaran per tanggal 02 Oktober 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan dengan total Belanja sebesar Rp. 14.636.445.300,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.090.589.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.545.856.300,-. Sedangkan target pendapatan tahun 2020 dari retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.800.088.450,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran beserta realisasinya pada Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.38
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran Perubahan 2020

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.800.088.450	2.401.254.375	(601.165.925)	133,40
JUMLAH PENDAPATAN		1.800.088.450	2.401.254.375	(601.165.925)	133,40
5.	BELANJA	14.636.445.300	14.152.822.238	483.623.062	96,70
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.090.589.000	3.822.511.904	268.077.096	93,45
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.090.589.000	3.822.511.904	268.077.096	93,45
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.545.856.300	10.330.310.334	215.545.955	97,96
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.091.812.000,00	1.060.243.000	31.569.000	97,11
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.993.790.300	5.946.063.334	47.726.966	99,20
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.460.254.000	3.324.004.000	136.250.000	96,06
JUMLAH BELANJA		14.636.445.300	14.152.822.238	483.623.062	96,70



Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.39
Capaian Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	7.088.512.200	6.942.863.771	97,95	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	1.558.680.500	1.515.644.485	97,24	Didukung oleh 1 (satu) program : • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	606.529.700	599.727.744	98,88	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	141.231.500	132.519.584	93,83	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
5	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	66.705.000	65.486.084	98,17	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	1.084.197.400	1.074.068.616	99,07	Didukung oleh 4 (empat) program : • Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarka data tersebut diatas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah untuk mendukung sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”.sedangkan sasaran yang paling sedikit alokasi anggarnnya adalah pada sasaran kelima “Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi”..



3.4 Analisis Efisiensi Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{IE} \\ &= \frac{\% \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{CAPAIAN INPUT}} \end{aligned}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} \\ &= \frac{\% \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}} \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$\begin{aligned} \text{Apabila } IE \geq SE &: \text{Kegiatan Efisien} \\ \text{Apabila } IE < SE &: \text{Kegiatan Tidak Efisien} \end{aligned}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{TE} = \frac{IE - SE}{SE}$$



Tabel 3.40
Pengukuran Efisiensi Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	%CAPAIAN		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	97,95	100	0,0209	Efisien
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	97,24	56,28	-0,4212	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	98,88	145,13	0,4677	Efisien
4	Terwujudnya penyelenggaraa persandian	93,83	100	0.0658	Efisien
5	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan Menara telekomunikasi	98,17	194,24	0.9786	Efisien
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	99,07	100,23	0.0117	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, 5 (lima) sasaran dikategorikan efisien karena hasil pengukuran menunjukan bahwa $IE \geq SE$, sementara ada 1 (satu) sasaran dikategorikan tidak efisien karena hasil menunjukan bahwa $IE < SE$.

3.5 Inovasi

Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon telah menginisiasi inovasi sebagai berikut :

1) MPresensi

Penerapan aplikasi “MPresensi” merupakan aplikasi mobile yang digunakan untuk merekam data presesnsi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan kedisiplinan pegawai dalam kehadiran tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.



2) SIM PATEN

Merupakan aplikasi perizinan di kecamatan yang diterapkan oleh Kecamatan Suranenggala simpaten.cirebonkab.go.id



3) OPEN SID

Merupakan aplikasi informasi dan pelayanan perizinan Desa yang diharapkan dapat membantu desa dalam beberapa hal seperti:

- b) Kantor desa lebih efisien dan efektif
- c) Pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel
- d) Layanan publik lebih baik
- e) Warga dapat mengakses lebih baik terkait informasi desa



Akses URL Online Open SID yaitu namadesa.cirebonkab.go.id. Berikut sampel dari aplikasi Open SID di salah satu Desa Di Kabupaten Cirebon

3.6 Penghargaan

Pada tanggal 22 Desember 2020 kabupaten cirebon dinobatkan sebagai:

- 1) *Top Digital Implementation On 2020 On District Government Level Stars (Bintang) 4*
- 2) *Top Digital Transformation Readiness 2020*
- 3) *Top Leader Digital Implementation (Untuk Bupati Cirebon)*
- 4) *Top It Management Digital Implementation (Untuk Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon)*

Ini merupakan anugerah yang luar biasa di penghujung tahun 2020 dan juga merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari bulan Januari – Desember 2020, Rencana Kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020 sebagaimana uraian data tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil pengukuran capaian rata-rata sasaran strategis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sebesar 115,96%
- 2) Pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” dengan indikator sasaran “Indeks Domain Tata Kelola SPBE” yaitu 2,57 poin dari target 2,57 poin sehingga masuk kriteria sangat baik.
- 3) Pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik” dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” yaitu 31,87 persen dari target 56,63 persen sehingga masuk kriteria rendah.
- 4) Pencapaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” dengan indikator sasaran “Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral” yaitu 58,05 persen dari target 40 persen sehingga masuk kriteria sangat baik.
- 5) Pencapaian sasaran strategis 4 “Terwujudnya penyelenggaraan persandian” dengan indikator sasaran “Indeks Keamanan Informasi” yaitu Level II dari target Level II sehingga masuk kriteria sangat baik.
- 6) Pencapaian sasaran strategis 5 “Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara Telekomunikasi” dengan indikator sasaran “Persentase pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi” yaitu 0,576 persen dari target 10 persen sehingga masuk kriteria sangat baik.
- 7) Pencapaian sasaran strategis 6 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” yaitu 3,558 poin dari target 3,550 poin sehingga masuk kriteria sangat baik.

- 8) Realisasi anggaran pada tahun 2020 dengan presentase 96,70 % dari keseluruhan anggaran Belanja sebesar Rp.14.636.445.300,-.
- 9) Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung sebesar Rp 215.545,955 atau sebesar 2,04%

4.2. Saran

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di masa mendatang, diperlukan strategi-strategi terukur, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang baru;
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Melakukan identifikasi/ pemetaan topologi jaringan di seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Cirebon, dalam rangka menangani permasalahan jaringan internet/ intranet yang lambat;
- 4) Mendorong pembangunan *single data* dan *big data* centre yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau OPD terkait;
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi PPID pada tiap Perangkat Daerah melalui pengembangan sistem informasi dan *portal/website* PPID pada seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID Perangkat Daerah mengenai tugas pokok, fungsi PPID dan mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- 6) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data
- 7) Dilakukan penyusunan/ penetapan kebijakan standar keamanan informasi dan manajemen resiko, Pembentukan tim khusus, dan Pelaksanaan IT Assessment dan Self Assessment;
- 8) Melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian;
- 9) Meningkatkan pelayanan fasilitasi *Video Conference* dan *Video Live Streaming*



Dengan tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610815 198603 1 012



LAMPIRAN